

Regional Fiscal In Brief

Vol V/ Juli/2025

ALCo

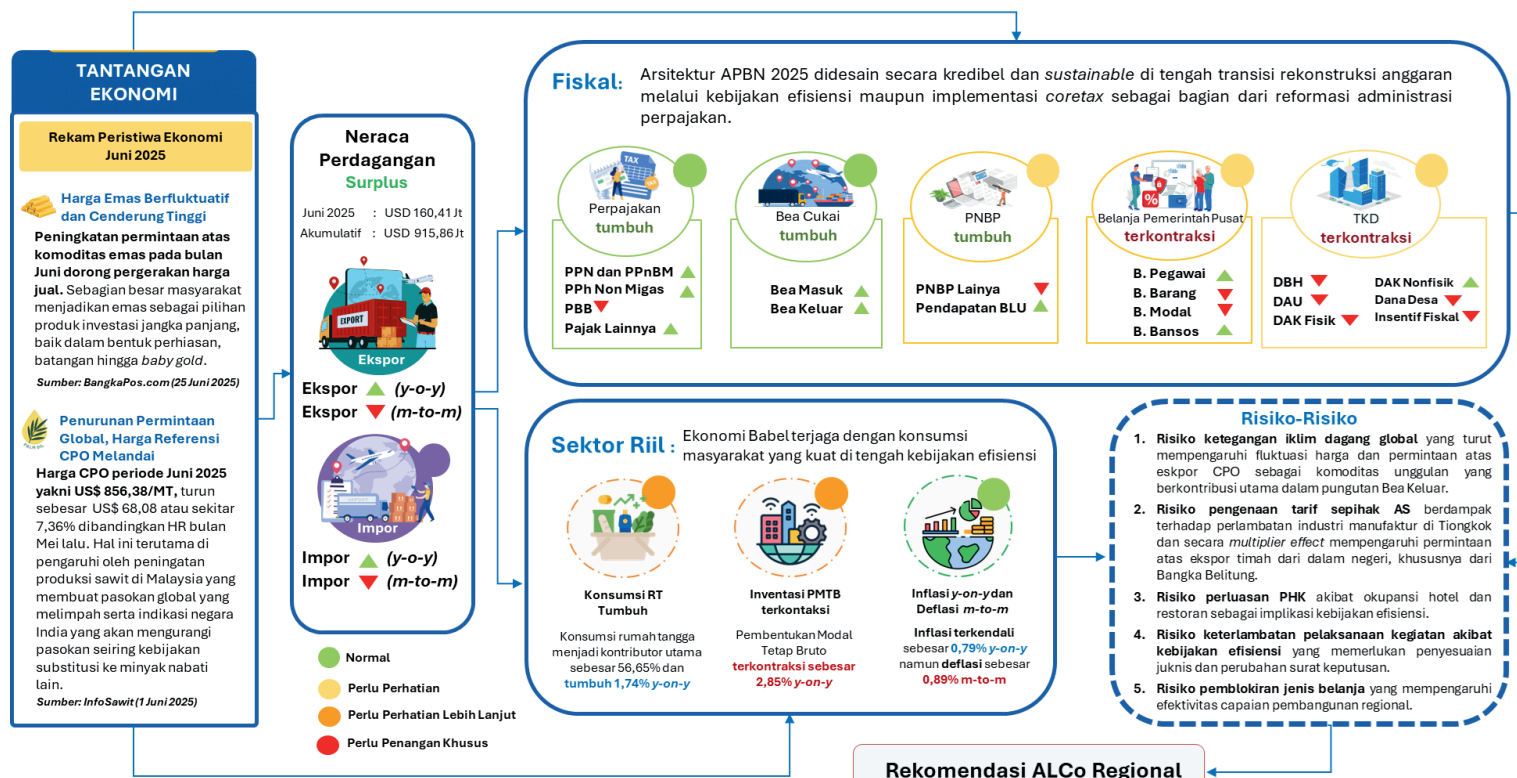
Provinsi Bangka
Belitung

EXECUTIVE SUMMARY

Pada triwulan I-2025, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mampu tumbuh 4,60 persen secara *y-on-y* setelah mengalami perlambatan sepanjang tahun 2024 akibat kasus tata niaga timah. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh tinggi akibat meningkatnya aktivitas industri logam dasar, terutama *smelter* timah, yang mempengaruhi permintaan produksi. Pada triwulan I-2025, ekspor logam timah mulai dilakukan pada bulan Januari 2025. Pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan didorong oleh meningkatnya permintaan bijih logam khususnya timah dan aktivitas pertambangan dan penggalan lainnya. Selain itu, inflasi Kepulauan Bangka Belitung pada Juni 2025 masih terjaga pada tingkat 0,99 persen (*y-on-y*) yang menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat yang terkendali.

Di sisi fiskal, hingga akhir Juni 2025 penerimaan negara dari penerimaan pajak dan bea cukai tercatat tumbuh 29,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, kebijakan efisiensi mendorong realisasi Belanja Pemerintah Pusat melambat, terutama pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Sementara itu, dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan daerah yang inklusif kepada 7 kabupaten/kota di lingkup Bangka Belitung, Belanja APBN masih didominasi Transfer ke Daerah yang mencapai 73,61 persen dari total belanja negara. Di sisi lain, realisasi pendapatan dan belanja APBD konsolidasi menurun yakni masing-masing sebesar 0,82 persen dan 17,53 persen *y-on-y*.

Strategic Dashboard



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

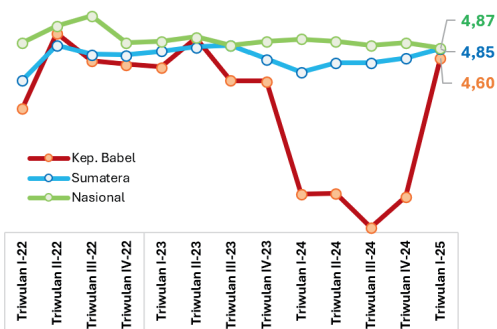
Pertumbuhan Ekonomi



c-to-c
4,60
persen

y-on-y
4,60
persen

q-t-q
-3,87
persen



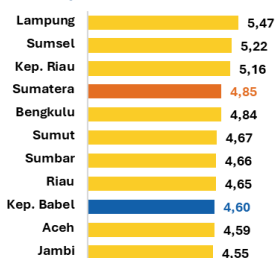
Secara y-on-y lebih rendah dari Sumatera & Nasional

Sumatera ➡ **4,85%**

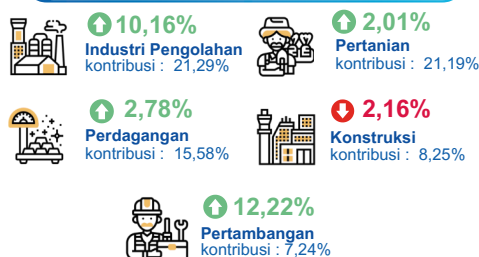
Nasional ➡ **4,87%**

Ekonomi Babel terjaga dengan konsumsi masyarakat yang kuat di tengah transisi rekonstruksi anggaran melalui kebijakan efisiensi

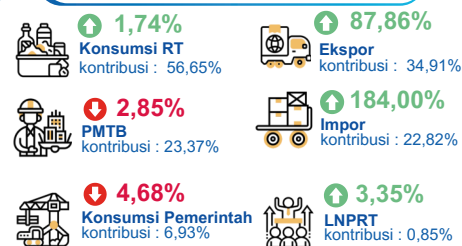
Laju Ekonomi Babel berada dalam peringkat kedepan se-Sumatera



PDRB LAPANGAN USAHA - TW I 2025



PDRB PENGELUARAN - TW I 2025



Inflasi

m-to-m
-0,10
persen

y-on-y
0,99
persen

y-to-d
0,70
persen



Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi utama y-on-y dengan andil 0,65% pada Juni 2025

Komoditas Penyumbang Inflasi (y-o-y)

Emas Perhiasan

0,25%

Sigaret Kretek Mesin

0,13%

Minyak Goreng

0,12%

Komoditas Penyumbang Deflasi (m-to-m)

Biaya Pendidikan SMA

0,41%

Cabai Merah

0,03%

Sawi Hijau

0,03%

Neraca Perdagangan



s.d Juni 2025

surplus **US \$ 915,86 Jt**

↑ **75,37%**
c-to-c

Ekspor

US \$ 920,16 jt

↑ **74,84%**
c-to-c

Impor

US \$ 4,30 jt

↑ **6,17%**
c-to-c

Indikator Kesejahteraan

IPM
74,55
↑ **0,62%**



Dimensi Pengetahuan

12,49

tahun



Umur Panjang dan Hidup Sehat

8,33

tahun



Hidup Layak

74,12

tahun

Rp13,67 juta



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Feb-24 **70,66**

➡

Feb-25 **67,67**

↓



Tingkat Pengangguran Terbuka

Feb-24 **3,85**

➡

Feb-25 **4,17**

↑



Serapan Tenaga Kerja Tertinggi

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

28,09%



NTP Juni-25

147,36

↓ **0,08%**

dari Mei-25

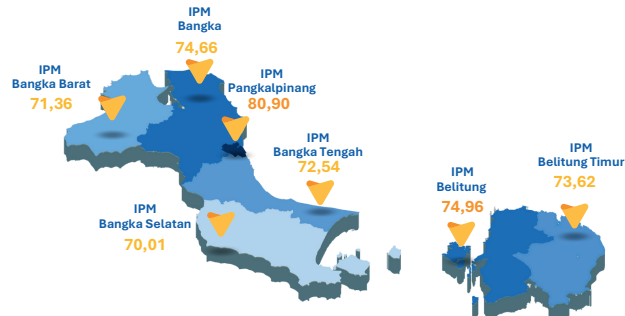


NTN Juni-25

108,61

↑ **1,27%**

dari Mei-25

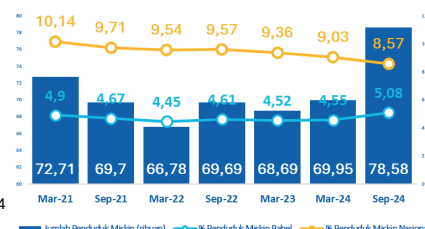


IPM Babel 2024 sebesar 74,55 termasuk kategori tinggi.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh peningkatan semua dimensi penyusunnya, baik untuk Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, maupun Pengeluaran Riil per Kapita.



Tingkat kemiskinan Babel September 2024 sebesar 5,08 persen. Capaian tersebut terendah keempat secara nasional.



Highlight KINERJA APBN

s.d. 30 Juni 2025

Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah efisiensi Belanja Negara

I-Account APBN Kep. Bangka Belitung

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Negara

Rp1,68 T

▲ 26,57% yoy

- Kontribusi **Penerimaan Perpajakan** masih mendominasi sebesar **92,78 persen** dari total Pendapatan Negara.

Belanja Negara

Rp4,43 T

▼ 8,79% yoy

- Belanja negara masih didominasi TKD yaitu sebesar **73,61 persen**.

Defisit Anggaran

Rp2,75 T

Pendapatan Negara

- **Penerimaan Pajak** didominasi PPN (Rp771,63 M) dan PPh (Rp601,65 M). Penerimaan Pajak dari Sektor Industri Pengolahan tumbuh 78,3% didorong oleh akselerasi industri minyak kelapa sawit (CPO) yang turut menyebabkan kenaikan signifikan Bea Keluar. Sementara itu, penerimaan dari Sektor Administrasi Pemerintahan melambat sebesar 30,86% seiring dengan penurunan pagu belanja pada sektor tersebut.

- **Penerimaan Bea Cukai** per bulan mengalami tren menurun akibat penurunan harga referensi CPO yang turun ke kolom 5. Meskipun demikian, secara akumulatif penerimaan Bea Cukai masih tumbuh signifikan dibandingkan tahun 2024.

- Kontribusi terbesar pada realisasi **PNBP** bersumber dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang terealisasi sebesar Rp37,42 miliar dan tumbuh 4,69% yoy. Pendapatan BLU didominasi Pendapatan Jasa Layanan Umum yang tumbuh 21,46% karena kenaikan pendapatan jasa pelayanan pendidikan.

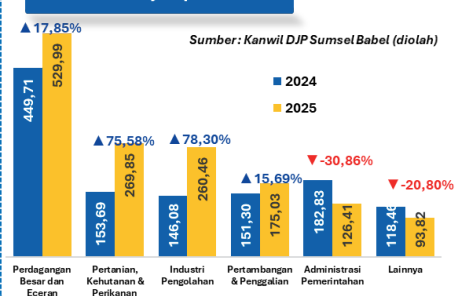
Belanja Negara

- **Belanja Barang** dan **Belanja Modal** terdampak signifikan atas kebijakan efisiensi, terutama belanja barang non operasional dan peradilan, serta penurunan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

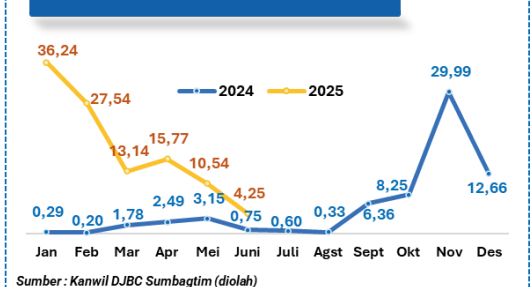
- Sebagian besar penyaluran **TKD** melambat. Perlambatan realisasi **DAK Fisik** dipengaruhi oleh penurunan pagu (32,11% yoy) dan sebagian besar proyek yang masih proses pengerjaan. Kontraksi **Dana Desa** disebabkan oleh kewajiban administratif pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan tahap selanjutnya.

Uraian	2024			2025			% Growth	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
a	b	c	d	e	f	g		
A. Pendapatan Negara	3.659,50	1.330,97	36,37%	3.296,13	1.684,66	51,11%	-9,93%	26,57%
I. Penerimaan Dalam Negeri	3.659,50	1.330,97	36,37%	3.296,13	1.684,66	51,11%	-9,93%	26,57%
1. Penerimaan Perpajakan	3.511,98	1.210,73	34,47%	3.141,17	1.563,05	49,76%	-10,56%	29,10%
a. Pajak Dalam Negeri	3.448,10	1.202,11	34,86%	3.125,45	1.455,77	46,58%	-9,36%	21,10%
Pajak Penghasilan Non Migas	1.591,18	460,38	28,93%	1.184,74	601,65	50,78%	-25,54%	30,69%
Pajak Pertambahan Nilai	1.726,64	733,52	42,48%	1.908,46	771,63	40,43%	10,53%	5,20%
Pajak Bumi dan Bangunan	101,10	8,17	8,08%	32,20	6,45	20,04%	-68,15%	-20,95%
Cukai	-	0,04	0,00%	-	0,20	0,00%	0,00%	420,82%
Pajak Lainnya	29,18	0,00	0,01%	0,05	75,83	151415%	-99,83%	3685674%
b. Pajak Perdagangan Internasional	63,88	8,62	13,50%	15,71	107,28	682,71%	-75,40%	1144,30%
Bea Masuk	5,29	1,52	28,63%	5,48	1,66	30,36%	3,57%	9,84%
Bea Keluar	58,59	7,11	12,13%	10,23	105,61	1032,17%	-82,54%	1386,16%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	147,52	120,24	81,50%	154,97	121,61	78,48%	5,05%	1,15%
Pendapatan PNPB Lainnya	97,24	99,44	102,27%	105,18	96,54	91,78%	8,17%	-2,92%
Pendapatan Badan Layanan Umum	50,28	20,79	41,35%	49,78	25,08	50,38%	-0,99%	20,62%
B. Belanja Negara	10.415,17	4.860,32	46,67%	9.861,25	4.433,07	44,95%	-5,32%	-8,79%
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.660,27	1.523,66	41,63%	3.155,32	1.169,81	37,07%	-13,80%	-23,22%
Belanja Pegawai	1.260,66	702,08	55,69%	1.321,84	742,27	56,15%	4,85%	5,72%
Belanja Barang	1.776,95	666,61	37,51%	1.179,85	358,97	30,43%	-33,60%	-46,15%
Belanja Modal	614,48	151,25	24,61%	643,73	64,10	9,96%	4,76%	-57,62%
Belanja Bantuan Sosial	8,18	3,73	45,56%	9,90	4,46	45,00%	20,97%	19,47%
II. Transfer ke Daerah	6.754,90	3.336,66	49,40%	6.705,93	3.263,27	48,66%	-0,72%	-2,20%
a. Dana Perimbangan	6.361,41	3.112,06	48,92%	6.334,95	3.056,89	48,25%	-0,42%	-1,77%
1) Dana Bagi Hasil	629,15	240,54	38,23%	543,62	220,33	40,53%	-13,59%	-8,40%
2) Dana Alokasi Umum	4.369,34	2.404,66	55,03%	4.500,91	2.337,87	51,94%	3,01%	-2,78%
3) Dana Alokasi Khusus	1.362,92	466,85	34,25%	1.290,42	498,68	38,65%	-5,32%	6,82%
- DAK Fisik	493,77	27,55	5,58%	335,20	25,56	7,63%	-32,11%	-7,21%
- DAK Nonfisik	869,15	439,30	50,54%	955,22	473,12	49,53%	9,90%	7,70%
b. Insentif Fiskal	98,10	46,21	47,10%	71,82	35,98	50,09%	-26,79%	-22,14%
c. Dana Desa	295,39	178,40	60,39%	299,17	170,40	56,96%	1,28%	-4,48%
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	- 6.755,67	- 3.529,36	52,24%	- 6.565,12	- 2.748,41	41,86%	-2,82%	-22,13%

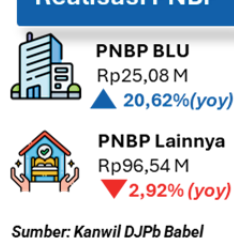
Realisasi Pajak per Sektor



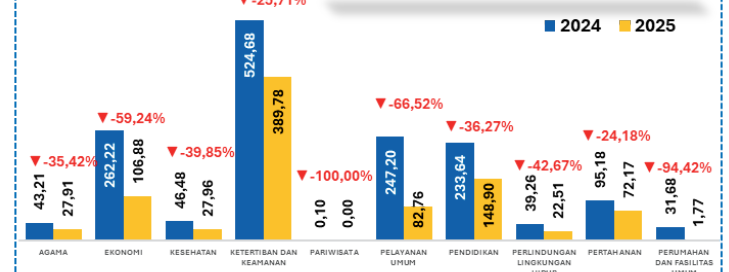
Realisasi Bea dan Cukai Per Bulan



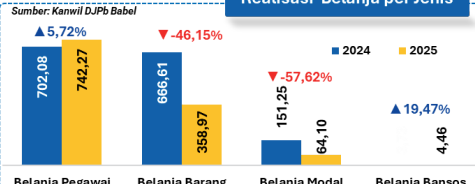
Realisasi PNBP



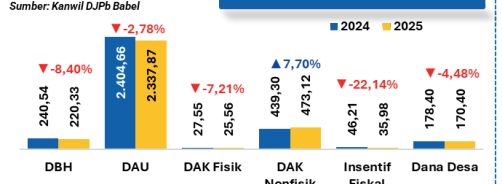
Realisasi Belanja per Fungsi



Realisasi Belanja per Jenis



Realisasi Transfer ke Daerah



Highlight KINERJA APBD

s.d. 30 Juni 2025

I-Account APBD Konsolidasian

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Daerah Konsolidasi

Rp3,24 T

▼ 0,82% yoy

- Kontribusi **Pendapatan dari Dana Transfer** masih mendominasi sebesar **75,53 persen** dari total Pendapatan Daerah.

Belanja Daerah Konsolidasi

Rp2,91 T

▼ 17,53% yoy

- Kontribusi Belanja Daerah didominasi dari **Belanja Operasi** sebesar **90,48 persen**.

Surplus Anggaran

Rp471,35 M

URAIAN	2024			2025			% Growth
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
A. Pendapatan	8.874,52	3.262,02	36,76%	8.832,82	3.235,24	36,63%	-0,82%
I. Pendapatan Asli Daerah	2.079,89	617,79	29,70%	2.109,10	784,47	37,19%	26,98%
- Pajak Daerah	1.513,30	465,85	30,78%	1.407,46	508,14	36,10%	9,08%
- Retribusi Daerah	153,94	21,14	13,74%	415,74	143,84	34,60%	580,30%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57,05	46,84	82,11%	57,28	19,47	33,99%	-58,44%
- Lain-Lain PAD yang Sah	355,60	83,95	23,61%	228,62	113,02	49,44%	34,63%
II. Pendapatan dari Dana Transfer	6.748,95	2.643,81	39,17%	6.704,68	2.443,50	36,44%	-7,58%
III. Lain - lain Pendapatan Daerah	45,69	0,42	0,92%	19,05	7,26	38,11%	1623,52%
B. Belanja Daerah dan Transfer	10.113,77	3.528,96	34,89%	9.641,26	2.910,21	30,18%	-17,53%
I. Belanja Operasi	8.042,62	3.159,33	39,28%	7.976,68	2.633,22	33,01%	-16,65%
- Belanja Pegawai	4.067,37	1.985,32	48,81%	4.616,63	1.792,88	38,84%	-9,69%
- Belanja Barang dan Jasa	3.523,29	906,46	25,73%	3.175,41	732,85	23,08%	-19,15%
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- Belanja Subsidi	2,14	0,54	25,09%	2,43	0,82	33,90%	53,11%
- Belanja Hibah	427,82	264,67	61,87%	159,15	102,62	64,48%	-61,23%
- Belanja Bantuan Sosial	22,01	2,34	10,65%	23,07	4,05	17,56%	72,88%
II. Belanja Modal	1.220,09	110,36	9,05%	920,78	43,87	4,76%	-60,25%
III. Belanja Tidak Terduga	94,75	2,08	2,19%	71,82	1,84	2,56%	-11,68%
IV. Transfer Pemerintah Daerah	756,31	257,19	34,01%	671,98	231,29	34,42%	-10,07%
- Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0,00	47,43	0,00%	27,60	8,05	29,17%	-83,02%
- Transfer Bantuan Keuangan	756,31	209,76	27,74%	644,38	223,23	34,64%	6,42%
C. Surplus/Defisit Anggaran	-1.239,25	-266,95	21,54%	-808,43	325,03	-40,20%	-221,76%
D. Pembiayaan Daerah	1.239,25	-4,00	-0,32%	808,43	146,32	18,10%	-3758,10%
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.362,95	0,00	0,00%	893,54	179,21	20,06%	0,00%
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	123,69	4,00	3,23%	85,11	32,88	38,64%	722,05%
SILPA		-270,95			471,35		-273,97%

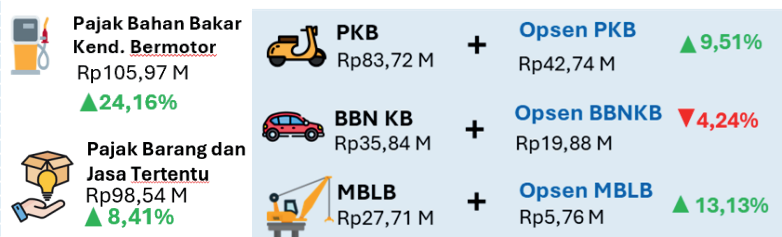
- Secara kumulatif, **Pendapatan Asli Daerah** didominasi oleh Pajak Daerah dengan kontribusi 64,77%, dan tumbuh sebesar 9,08% seiring dengan pulihnya ekonomi Babel.
- Kinerja **Retribusi Daerah** tumbuh positif dan signifikan sebesar 580,30% yoy yang dipengaruhi oleh peningkatan kinerja seluruh komponen retribusi daerah dan reklasifikasi pendapatan BLUD Kesehatan ke Retribusi Jasa Umum.
- Lain-lain PAD yang Sah** tumbuh antara lain dipengaruhi peningkatan Pendapatan dari Pengembalian, Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

- Belanja Pegawai** turun 9,69% yoy karena sebagai implikasi penurunan Belanja Tambahan Penghasilan PNS.
- Belanja Barang dan Jasa** melambat 19,15% yoy sebagai akibat turunnya kinerja Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa.
- Belanja Modal** turun 60,25% yoy, utamanya karena perlambatan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

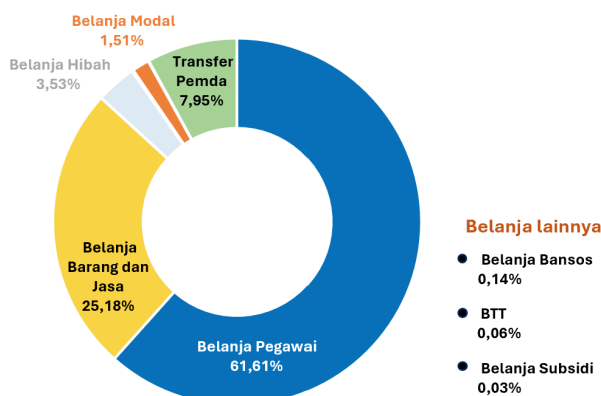
Kinerja Pajak Barang dan Jasa Tertentu



Top 5 Pajak Daerah



Proporsi Belanja Daerah dan Transfer



- Sampai akhir Juni 2025, Belanja Pegawai mendominasi 61,61% dari total realisasi belanja daerah (max 30% menurut UU HKPD). Sementara, Belanja Modal hanya berkontribusi 1,51% dari total belanja daerah (minimal 40% belanja infrastruktur menurut UU HKPD).
- Pemda lingkup Kep. Bangka Belitung perlu mengupayakan penurunan proporsi Belanja Pegawai secara bertahap sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 2022 yang mengamankan alokasi Belanja Pegawai maksimal sebesar 30% dari total Belanja Daerah dan Transfer, dan selanjutnya diiringi belanja infrastruktur sebesar 40%.

Kemandirian Fiskal Bangka Belitung Tercatat Rendah

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemda konsolidasian di Kep. Bangka Belitung s.d. Juni 2025 yakni 0,24 dan tercatat tumbuh dari Indeks Kemandirian Fiskal s.d. Juni 2024 yakni 0,19. IKF di Kep. Bangka Belitung dikelompokkan dalam kondisi "Belum Mandiri" (0,00 - 0,25). Hal ini mengindikasikan bahwa PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan Belanja Daerah, sehingga Pemda di Kep. Bangka Belitung masih sangat tergantung dengan Dana Transfer karena PAD hanya cukup untuk membiayai 26,96% Belanja Daerah.



AKSELERASI PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH

- Pemda agar melakukan akselerasi proses pengangkatan PPPK, mengingat belum terealisasinya penyaluran DAU Penggajian Formasi PPPK pada beberapa pemda hingga akhir Juni 2025. Selain itu, perlu dilakukan percepatan penyelesaian kontrak dalam pemenuhan syarat salur DAK Fisik.
- Selanjutnya, pemda dapat melakukan *benchmarking* pada pemda lain untuk meningkatkan kinerja pengelolaan TKD agar dapat memperoleh Insentif Fiskal pada periode berikutnya.
- K/L agar menyampaikan juknis penyaluran TKD dan juknis operasional sesuai bidang tugasnya di awal waktu agar penyaluran oleh KPPN dapat segera dilaksanakan



PELAKSANAAN APBD

- Pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan tata kelola administrasi pajak daerah dengan fokus pada pajak daerah yang memiliki tingkat prioritas tinggi di antaranya BPHTB, Pajak Rokok, dan PBB KB. Pemda agar mengidentifikasi aspek administratif meliputi pendataan ulang wajib pajak, strategi kerjasama dengan komunitas/LSM, perluasan basis pajak, penguatan mekanisme *reward & punishment* hingga persiapan dukungan sistem informasi.
- Pemda agar dapat menggunakan pembiayaan kreatif (*creative financing*) dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU atau pembiayaan lainnya, seperti pengembangan RSUD Junjung Besaoh dan lampu hias jalan di Kabupaten Bangka Selatan. Dalam hal ini, KPKNL Pangkalpinang siap mendampingi perikatan pembiayaan oleh Pemda pada beberapa *Special Mission Vehicle* (SMV), salah satunya PT PII.



REVITALISASI RUANG KELAS DAN PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI MURNI

- Pemda diharapkan dapat memprioritaskan revitalisasi ruang kelas existing sebelum melakukan pembangunan SD baru. Pemerintah dapat mengoptimalkan DAK Fisik untuk melakukan renovasi terhadap ruang kelas yang kondisinya rusak ringan hingga rusak berat..
- Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar sudah sangat bagus. Namun demikian, APM SMP di Babel lebih rendah yaitu sebesar 77 persen, dan tingkat SMA semakin menurun pada level 61,71 persen. Pemerintah diharapkan dapat memetakan *missing link* dan melakukan intervensi untuk mengurangi angka putus sekolah sehingga anak-anak Kepulauan Bangka Belitung dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.



“Percepat Dukungan Fiskal demi Optimalisasi Pembangunan Daerah hingga Semester I 2025”

